

LAPORAN FORMAT RKPD TAHUN 2021



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dengan baik.

Rencana kerja ini merupakan acuan dan pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya.

Rencana Kerja ini merupakan bentuk komitmen bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja ini.

Demikian Renja ini kami buat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana kerja ini.

Mali, 25 Juni 2021
Kepala DPPKB Luwu Timur

Ir. NURSIH HARIANI
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19680619 199403 2 014

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	35
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	42
BAB V PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra s.d Tahun 2020 Perangkat Daerah	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.....	18
Tabel 2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.....	22
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen rencana pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 nantinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju utara di propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembar an Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke dalam program/kegiatan tahunan 2022
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembnagunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi tentang:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

- 2.7. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Standar Pelayanan Minimal (SPM) /Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.8. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.9. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- c. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.5. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.6. Program dan Kegiatan

Berisikan uraian mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja Tahun 2020. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur meliputi realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan, realisasi program / kegiatan yang memenuhi target yang direncanakan dan realisasi program dan kegiatan yang melebihi target yang direncanakan.

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur s/d Tahun 2020 :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra s.d Tahun 2020 Kab. Luwu Timur

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2021 (n-1)	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
2.08.2.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	100 persen							
2.08.2.08.01.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	1600 surat	0	800	800	100	0	0	0
2.08.2.08.01.01.07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan	240 rekening	48	48	48	100	48	48	100
2.08.2.08.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	1 orang	1	1	1	100	1	1	100
2.08.2.08.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3 Jenis	3	3	3	100	3	3	100
2.08.2.08.01.01.12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	80 Jenis	0	0	0	0	0	0	0
2.08.2.08.01.01.15	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	0	0	0	0	0	0	0
2.08.2.08.01.01.18	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik instalasi listrik bangunan yang disediakan	2 unit	2	2	2	100	2	2	100
2.08.2.08.01.01.19	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	300 eksamplar	60	60	60	100	60	60	100

2.08.2.08.01.01.22	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang disediakan	4652 kotak	0	0	0	0	0	0	0
2.08.2.08.01.01.23	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi keluar daerah	392 kali	134	84	84	100	84	84	100
2.08.2.08.01.01.24	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	16 orang	16	16	16	100	16	16	100
2.08.2.08.01.02.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	20 Dokumen	4	4	4	100	4	4	100
2.08.2.08.01.02.05	Kunjungan kerja dalam daerah	Frekuensi kunjungan dalam daerah	1880 kunjungan	346	300	300	100	300	350	116
2.08.2.08.01.02.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	95%							
2.08.2.08.01.02.12	Pembangunan Pagar Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	1 unit	0	0	0	0	0	0	0
2.08.2.08.01.02.22	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	103 unit	31	31	31	100	31	31	100
2.08.2.08.01.02.24	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	69 unit	12	9	20	222	9	9	100
2.08.2.08.01.03	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Luas taman, lapangan parkir yang dibangun	1 keg	0	0	0	0	0	0	0
2.08.2.08.01.03.05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2	2	2	100	2	2	100
2.08.2.08.01.05	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	110 unit	48	48	79	164	79	79	100
2.08.2.08.01.06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu	90%							
2.08.2.08.01.06.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	33 orang	32	33	0	0	0	0	0

2.08.2.08.01.08	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	95%							
2.08.2.08.01.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	20 dokumen	4	6	6	100	4	4	100
2.08.2.08.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	51 orang							
2.08.2.08.01.15.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	51 orang	5	15	15	100	15	15	100
2.08.2.08.01.15.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%							
2.08.2.08.01.15.07	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	8 dokumen	3	1	1	100	3	3	100
2.08.2.08.01.15.08	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan semester dan akhir tahun yang disusun	6 dokumen	1	3	3	100	3	3	100
2.08.2.08.01.15.09	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	Persentase jumlah kelompok UPPKS yang dibina	100 persen							
2.08.2.08.01.15.10	Identifikasi dan fasilitasi pembentukan kelompok UPPKS	jumlah kelompok yang teridentifikasi dan terfasilitasi	4 kelompok	0	2	2	100	2	2	100
2.08.2.08.01.17	Pembinaan dan pengembangan UPPKS	jumlah kelompok yang dibina	18 kelompok	0	15	15	100	15	15	100

2.08.2.08.01.17.04	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	32,8 Persen;100 Persen							
2.08.2.08.01.18	Pelayanan KB medis operasi	jumlah akseptor KB metode operasi (wanita dan pria) yang terlayani	270 orang	40	30	30	100	30	30	100
2.08.2.08.01.18.02	pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi	jumlah klinik yang mendapatkan distribusi alokon	19 klinik	0	19	19	100	19	19	100
2.08.2.08.01.18.03	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per-keluarga; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need); Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	2,75 orang;13,15 Persen;83,25 Persen							
2.08.2.08.01.18.04	Pelayanan KB daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan	jumlah akseptor yang terlayani	1000 orang	149	175	175	100	175	175	100
2.08.2.08.01.18.05	Operasional penyuluh KB	jumlah balai yang mendapat dukungan operasional pembiayaan	12 balai	11	12	12	100	12	12	100
2.08.2.08.01.20	Pelayanan KB bagi Masyarakat	Jumlah akseptor baru yang dilayani	6.405 Orang	4350	6405	4834	75.47	6405	5002	78.09
		Jumlah akseptor aktif yang dilayani	34.065 Orang	33396	33284	33227	99.82	33284	32503	97.65
2.08.2.08.01.23	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	Persentase jumlah kelompok yang dibina	100 Persen							
2.08.2.08.01.23.01	Peningkatan Pembinaan Bina Keluarga Balita	Jumlah kelompok BKB yang dibina	55 kelompok	55	11	11	100	11	11	100
	Peningkatan Pembinaan Keluarga Remaja	jumlah kelompok BKR yang dibina	55 kelompok	55	11	11	100	11	11	100
	peningkatan pembinaan keluarga lansia	jumlah kelompok BKL yang dibina	55 kelompok	55	11	11	100	11	11	100
	apresiasi hari keluarga nasional	jumlah kategori lomba	11 kategori	11	11	11	100	11	11	100

	pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas PIK KRR	jumlah kelompok PIK Remaja jalur pendidikan yang diberikan pelatihan	36 kelompok	22	34	34	100	34	34	100
		JUmlah kelompok PIK Remaja jalur masyarakat yang diberikan pelatihan	2 kelompok	5	1	1	100	1	1	100
	Program Peningkatan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	9,09 Persen;13,15 Persen							
	Pendewasaan usia perkawinan	Jumlah sekolah tingkat SMP DAN SMA yang mendapatkan penyuluhan	12 sekolah	12	12	12	100	12	12	100
	Peningkatan kualitas pelayanan KIE	Jumlah peserta pelatihan	440 orang	484	220	220	99.18	220	220	220
	Sosialisasi Kebijakan Dampak Kependudukan	jumlah peserta sosialisasi	24 orang	0	24	24	100	24	24	100
	Workshop Advokasi KIE KKBPK	jumlah peserta workshop	120 orang	0	60	60	100	0	0	0
	Program Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4 OPD							
	Pengelolaan data dan informasi keluarga	jumlah dusun yang didata	491 dusun	491	491	491	100	491	491	100
	Grand Design pembangunan keluarga	jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi perumusan kebijakan dan pengelolaan program	Jumlah peserta yg mengikuti koordinasi perumusan kebijakan dan pengelolaan program	200 orang	200	200	200	100	200	200	100
	Program Optimalisasi Pdayagunaan Tenaga PLKB	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100 Persen							

	Pembinaan dan pengawasan kinerja PLKB	jumlah PLKB yang di bina	116 orang	0	115	115	0	115	114	99.13
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB; Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	41,17 Persen;100 Persen							
	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	jumlah PPKBD yang diberdayakan	127 orang	127	127	127	100	127	127	100
		jumlah sub PPKBD yang diberdayakan	454 orang	342	491	491	100	491	491	100
	Fasilitasi pembinaan kampung KB	jumlah kampung kb yang dibina	36 kampung KB	11	24	24	100	24	24	100

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Indikator Kinerja Kunci Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	2.25	2.26	2.26	2.26	2.25	1.63	1.99	1.99	1.55	
2	Indeks Ketahanan Keluarga	-	10.96	10.37	10.61	10.70	10.96	10,3	10.40	11.05	10.50	
3	Jumlah Skor LAKIP	-	70	55	60	65	70	70.90	56.32		70.00	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur 2016-2021 yang berjumlah 3 (tiga) indicator adalah indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab.Luwu Timur 2016-2021.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini menjadi tolak ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu Timur. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2021 bahwa dari Tiga indicator di atas, rata-rata semuanya mencapai target.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendapat tempat yang cukup penting dalam pembangunan, ini dapat dilihat dari arah prioritas pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Seiring kondisi tersebut isu – isu di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga berjalan dinamis. Isu pada kondisi daerah Kabupaten Luwu timur :

a. Pada Bidang pengendalian penduduk Yaitu :

1. Belum optimalnya Advokasi dan KIE Operasional di lapangan;
2. Belum optimalnya Pendataan Keluarga yang akurat

3. Belum Optimalnya pemahaman tentang Pentingnya Kesehatan

Reproduksi Remaja.

4. Belum terpenuhinya tenaga Sub PPKBD di semua dusun yang ada
5. Belum Optimalnya Keterlibatan Lintas Sektoral yang lain di Kampung KB
6. Masih Terdapat Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang belum memahami Tugas dan Fungsinya dengan baik.

b. Pada Bidang Keluarga Sejahtera :

1. Belum optimalnya pembinaan oleh kelompok Tribina;
2. Belum optimalnya pengetahuan kader Kelompok Kegiatan (POKTAN) tentang tugas-tugasnya.
3. Masih Kurangnya Kelompok UPPKS terbentuk di lingkungan masyarakat
4. Masih kurangnya keaktifan kader-kader Kelompok Kegiatan (POKTAN).

c. Pada Bidang Keluarga Berencana :

1. Belum Optimalnya Pemahaman Masyarakat tentang Penting Program Keluarga Berencana
2. Masih Kurangnya Pemahaman atau Pengetahuan Masyarakat Tentang Manfaat Penggunaan Alat dan obat Kontrasepsi
3. Masih terdapat Pemahaman keliru atau informasi yang salah tentang Efek Samping Alat dan obat Kontrasepsi di Masyarakat
4. Masih kurangnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) , yang dalam hal ini hanya menunggu drop dari perwakilan BKKBN provinsi Sulawesi Selatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Dalam melakukan review terhadap rancangan awal rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022

dilakukan perbandingan antara perumusan hasil identifikasi kebutuhan program dengan dan kegiatan berdasarkan analisis yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dan juga tingkat kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program / kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupa rancangan awal RKPD.

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 Persen	3.265.655.355	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 Persen	3.243.876.111
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 Persen	93.591.831	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 Persen	88.612.587
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	DPP KB	3 Dokumen	18.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	DPPK B	3 Dokumen	14.408.091
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	DPP KB	2 Dokumen	9.346.955	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	DPPK B	2 Dokumen	9.346.955
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DKA-PD	DPP KB	2 Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DKA-PD	DPPK B	2 Dokumen	6.612.665
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	DPP KB	8 Dokumen	58.244.876	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	DPPK B	8 Dokumen	58.244.876

X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		100 Persen	2.296.065.671	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		100 Persen	2.296.065.671
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN	DPP KB	18 orang	2.261.573.946	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN	DPPK B	18 orang	2.261.573.946
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	DPP KB	10 Dokumen	34.491.725	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	DPPK B	10 Dokumen	34.491.725
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100 Persen	19.505.668	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100 Persen	19.505.668
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	DPP KB	4 dokumen	19.505.668	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	DPPK B	4 dokumen	19.505.668
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani		100 Persen	84.345.080	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani		100 Persen	69.345.080
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	DPP KB	36 Pegawai	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	DPPK B	36 Pegawai	20.000.000
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	DPP KB	8 Pegawai	34.005.080	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	DPPK B	8 Pegawai	34.005.080
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	DPP KB	5 Orang	15.340.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	DPPK B	5 Orang	15.340.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100 Persen	435.031.150	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100 Persen	435.031.150

X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	DPP KB	2 jenis	3.266.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	DPPK B	2 jenis	3.266.350
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	DPP KB	203 unit	5.519.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	DPPK B	203 unit	5.519.500
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	DPP KB	3 jenis	9.999.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	DPPK B	3 jenis	9.999.900
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	DPP KB	60 exemplar	6.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	DPPK B	60 exemplar	6.120.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	DPP KB	125 orang	5.625.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	DPPK B	125 orang	5.625.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	DPP KB	411 kali	404.500.400	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	DPPK B	411 kali	404.500.400
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 Persen	122.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 Persen	120.200.000
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	DPP KB	2 unit	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	DPPK B	2 unit	60.000.000
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah mebel yang diadakan	DPP KB	2 unit	25.000.000	Pengadaan Meubel	Jumlah mebel yang diadakan	DPPK B	2 unit	25.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	DPP KB	2 unit	22.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	DPPK B	2 unit	20.200.000
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	DPP KB	1 unit	15.000.000	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	DPPK B	1 unit	15.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100 Persen	103.115.955	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100 Persen	103.115.955

X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	DPP KB	800 exemplar	15.115.955	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	DPPK B	800 exemplar	15.115.955
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	DPP KB	48 Rekening	50.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	DPPK B	48 Rekening	50.400.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPP KB	2 orang	37.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPPK B	2 orang	37.600.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100 Persen	112.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100 Persen	112.000.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPP KB	98 uit	88.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPPK B	98 uit	88.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	DPP KB	4 unit	14.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	DPPK B	4 unit	14.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	DPP KB	2 unit	10.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	DPPK B	2 unit	10.000.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD)		4 OPD	644.495.826	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD)		4 OPD	628.000.000

2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		2 dokumen	429.815.826	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		2 dokumen	428.000.000
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPk)	Jumlah Kebijakan Daerah terhadap KKBPk yang diserasikan	DPP KB	2 dokumen	30.000.000	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPk)	Jumlah Kebijakan Daerah terhadap KKBPk yang diserasikan	DPPK B	2 dokumen	30.000.000
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah GDPK kabupaten yang disusun	DPP KB	1 dokumen	300.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah GDPK kabupaten yang disusun	DPPK B	1 dokumen	300.000.000
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK)	DPP KB	3 dokumen	50.000.000	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK)	DPPK B	3 dokumen	50.000.000
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi	DPP KB	24 orang	21.000.000	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi	DPPK B	24 orang	20.000.000
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Peserta Rapat	DPP KB	130 orang	28.815.826	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Peserta Rapat	DPPK B	130 orang	28.000.000

2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa		100	214.680.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa		100	200.000.000
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil Kependudukan yang disusun	DPP KB	1 dokumen	42.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil Kependudukan yang disusun	DPPK B	1	40.000.000
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	Jumlah Rumah Data yang dibentuk	DPP KB	5 rumah data	30.000.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	Jumlah Rumah Data yang dibentuk	DPPK B	5	30.000.000
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan informasi yang tersedia	DPP KB	3 dokumen	107.680.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan informasi yang tersedia	DPPK B	3	105.000.000
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah peserta yang dibina	DPP KB	110 orang	35.000.000	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah peserta yang dibina	DPPK B	110	25.000.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)		66.00	5.454.461.680	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)		66.00	4.835.564.680
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		100	1.135.128.528	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		100	1.135.128.528
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK	DPP KB	40 orang	20.023.902	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK	DPPK B	40 orang	20.023.902

2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE	DPP KB	935 orang	56.400.189	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE	DPPK B	935 orang	56.400.189
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE yang disediakan	DPP KB	8 jenis	168.547.300	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE yang disediakan	DPPK B	8 jenis	168.547.300
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan	DPP KB	12 balai penyuluhan	890.157.137	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan	DPPK B	12 balai penyuluhan	890.157.137
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk		100	1.814.559.800	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk		100	1.814.559.800
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina	DPP KB	110 orang	94.744.800	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina	DPPK B	110 orang	94.744.800
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan	DPP KB	581 orang	1.719.815.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan	DPPK B	581 orang	1.719.815.000

2.14.03.2.03	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		26.00	1.899.613.352	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		26.00	1.280.716.352
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokasi	DPP KB	21 faskes	72.411.868	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokasi	DPPK B	21 faskes	72.411.868
2.14.03.2.03.03	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor MKJP yang dilayani	DPP KB	11500 akseptor	748.304.484	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor MKJP yang dilayani	DPPK B	11500 akseptor	748.304.484
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang KB yang tersedia	DPP KB	433 unit	938.897.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang KB yang tersedia	DPPK B	433 unit	390.000.000
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Nakes yang terlatih	DPP KB	20 orang	120.000.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Nakes yang terlatih	DPPK B	20 orang	50.000.000
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kecamatan yang mendapatkan operasional pelayanan KB bergerak	DPP KB	11 kecamatan	20.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kecamatan yang mendapatkan operasional pelayanan KB bergerak	DPPK B	11	20.000.000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi masyarakat) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		23	605.160.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi masyarakat) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		23	605.160.000

2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	DPP KB	24 kampung KB	605.160.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	DPPKB	24 kampung KB	605.160.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Indeks Pembangunan Keluarga		35.02	1.039.819.195	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Indeks Pembangunan Keluarga		35.02	804.129.640
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		71.18	993.010.069	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		71.18	757.320.514
2.14.04.2.01.01	Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	Jumlah Kelompok yang terbentuk	DPP KB	6 kelompok	27.022.908	Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	Jumlah Kelompok yang terbentuk	DPPKB	6 kelompok	27.022.908
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok yang diadakan	DPP KB	30 unit	540.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok yang diadakan	DPPKB	30 unit	304.407.846
2.14.04.2.01.03	Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan	DPP KB	60 kelompok	141.489.760	Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan	DPPKB	60 kelompok	141.489.760

2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi	DPP KB	35 kelompok	154.497.401	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi	DPPK B	35 kelompok	154.400.000
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta promosi sosialisasi	DPP KB	10 kelompok	35.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta promosi sosialisasi	DPPK B	10 kelompok	35.000.000
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Kebijakan pendukung tercapainya IPK	DPP KB	1 dokumen	35.000.000	Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Kebijakan pendukung tercapainya IPK	DPPK B	1 dokumen	35.000.000
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi	DPP KB	40 orang	30.000.000	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi	DPPK B	40 orang	30.000.000
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah peserta sosialisasi IPK	DPP KB	40 orang	30.000.000	Sosialisasi IPK	Jumlah peserta sosialisasi IPK	DPPK B	40 orang	30.000.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		75.01	46.809.126	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		75.01	46.809.126

2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi /UPPKS)	Jumlah Mitra dan Organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	DPP KB	10 Mitra	26.809.126	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi /UPPKS)	Jumlah Mitra dan Organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	DPPK B	10 Mitra	26.809.126
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi	DPP KB	10 orang	20.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi	DPPK B	10 orang	20.000.000
					10.404.432.056					9.511.570.431

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme musrenbang, pokok pikiran anggota DPRD, dan usulan teknokratis. Kemudian usulan – usulan itu diinventarisasi berdasarkan program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan musrenbang tahun 2021, tidak ada usulan-usulan yang ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJM Nasional tercantum tiga agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kesejahteraan dan menata perekonomian tertuang dalam strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan disertai pemerataan atau *grow with equity*. Strategi ini merupakan pilihan yang paling tepat karena pertumbuhan saja tidak menjamin pemerataan. Pertumbuhan yang dicapai harus memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang telah disusun, terdapat Sejumlah Indikator dan sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Renstra BKKBN Pusat Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini disusun sebagai dokumen Perencanaan yang memuat Tugas dan fungsi, kewenangan, Perkembangan kondisi dan isu strategis, arah kebijakan serta strategi dan kegiatan 5 Tahun kedepan.

Terdapat 6 Indikator Utama Target nasional yang menjadi Sasaran yang ingin dicapai sampai Tahun 2024 Yaitu :

- a. Menurunkan Angka Kelahiran Total / Total Fertilate Rate diangka 2,06%
- b. Meningkatkan Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern diangka 56.28%
- c. Menurunkan persentase Kebutuhan BerKB yang Tidak Terpenuhi/Unmet Need diangka 7.17%
- d. Menurunkan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR) diangka 29 %
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) diangka 64.55
- f. Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita Umur 25-49 menjadi 22.1

Pada setiap kegiatan direncanakan harus memperhatikan kondisi dan isu strategis yang berkembang, serta memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, sehingga pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dapat tepat sasaran dan memberi mamfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan program kegiatannya antara lain :

1. Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel
2. Meningkatkan penduduk yang berkualitas

Sasaran untuk jangka menengah yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Menurunnya angka kelahiran
2. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian integral dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan penjabaran program instansi yang telah dicanangkan dan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK dengan kegiatan meliputi :
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

- Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
 - Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA dengan kegiatan meliputi :
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal
- Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

- Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya
 - Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB
- Pembinaan Terpadu Kampung KB
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)
 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
 - Advokasi dan Promosi IPK
 - Sosialisasi IPK
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi /UPPKS)
 - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Selain program kegiatan wajib yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat juga program kegiatan penunjang diantaranya :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dengan kegiatan dan subkegiatan meliputi :
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Meubel
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(terlampir)

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanakedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V PENUTUP

Rencana Anggaran Pada Tahun 2022 untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur sebesar **Rp. 8.970.570.431 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kerja Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dari

berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PP & KB
Jl. SOEKARNO HATTA, Malili
Kab. Luwu Timur
Telepon (0474) 321489

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

SASARAN STRATEGIS			URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	ANGGARAN	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (Rata-rata anak per Wanita)	2,73	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata Jumlah anak per keluarga	anak	2.03	61.291.899	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	dokumen	2	18.611.899	
			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	35	18.611.899	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	persen	100%	42.680.000	
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah jenis data keluarga yang ada	jenis	3	42.680.000	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	persen	13.46%	5.356.550.993	

			Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	persen	29.91%		
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	36.64%		
			Angka Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate / mCPR)	persen	57.20%		
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	persen	100%	1.139.384.191	
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK	orang	40	17.353.902	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE	orang	275	18.430.189	
		Penyediaan dan distribusi sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE yang disediakan	jenis	9	168.547.300	
		Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan	Balai Penyuluhan	12	935.052.800	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang telah didayagunakan	persen	100%	1.816.609.852	
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina	orang	110	96.794.800	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan	orang	581	1.719.815.052	
		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	100%	1.780.596.950	

			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokasi	Faskes	21	72.781.868	
			Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor MKJP	akseptor	11500	751.304.484	
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang KB yang tersedia	unit	422	956.510.598	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stakholder	23	619.960.000	
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	Kampung KB	24	619.960.000	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35,05	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata usia kawin pertama	tahun	20	305.485.069	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	71,13%	305.485.069	
			Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	Jumlah Kelompok yang terbentuk	kelompok	5	12.897.908	
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan	kelompok	50	168.384.760	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi	kelompok	25	124.202.401	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan	Nilai SAKIP	65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persen	100%	2.907.517.844	

pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Persen	100%	63.683.427	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	13.038.931	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	dokumen	2	6.216.955	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	dokumen	2	6.612.665	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	dokumen	10	37.814.876	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Persen	100%	2.109.252.114	Target Pada Tw.
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	orang	18	2.074.760.389	
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	dokumen	10	34.491.725	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Persen	100%	336.269.150	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	jenis	2	3.266.350	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit	168	4.872.500	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	3	8.289.900	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	eksamplar	60	6.120.000	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	orang	150	6.750.000	

		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	kali	377	306.970.400	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Persen	100%	53.756.450	
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	6	53.756.450	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	115.115.955	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	surat	600	15.115.955	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	rekening	48	62.400.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	orang	3	37.600.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	132.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	unit	96	88.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	3	14.000.000	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	30.000.000	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Persen	100%	14.285.668	
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	dokumen	4	14.285.668	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	83.155.080	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	stel	39	27.800.000	
		Pendataan dan Pengolahan Admistrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data admistrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	dokumen	6	30.875.080	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	orang	2	24.480.000	
TOTAL ANGGARAN						8.630.845.805	

Malili, 13 Oktober 2021

Kepala DPPKB Kab. Luwu Timur,



Ir. NURSIH HARIANI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680610 199403 2 014

